

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**Linus A. Ch Sakan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

sakanren979@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Aktivitas Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series Laporan Keuangan. Hasil penelitian dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh klasifikasi Kriteria rendah sekali karena berada pada interfal di bawah 25% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Rasio Efektifitas PAD menunjukkan Efektifitas PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat efektif karena berada pada interfal di atas 100% dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Rasio Efisiensi PAD menunjukkan Efisiensi PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat efisien karena berada pada interfal di bawah 60% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan Rasio Aktivitas Belanja Daerah menunjukkan Aktivitas Belanja Daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin dari pada belanja modal dan belanja rutin cenderung menurun dari tahun ke tahun sedangkan belanja modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

***Kata kunci : Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan.***

### **ABSTRACT**

*This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency for the 2015-2020 period based on the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue, Efficiency Ratio of Regional Original Income and Regional Expenditure Activity Ratio. This study uses a quantitative descriptive method with secondary data in the form of time series data on Financial Statements. The results of the study using the Regional Financial Independence Ratio showed that Regional Financial Independence obtained a very low criterion classification because it was in the interval below 25% and tended to decrease from year to year, the PAD Effectiveness Ratio showed the PAD Effectiveness obtained a very effective criteria classification because it was in the interfal in above 100% and tends to increase from year to year, the PAD Efficiency Ratio shows PAD Efficiency obtains a very efficient criteria classification because it is at an interval below 60% and tends to decrease from year to year and the Regional Expenditure Activity Ratio shows that Regional Expenditure Activities are prioritized on routine expenditures rather than capital expenditures and routine expenditures tend to decrease from year to year while capital expenditures tend to increase from year to year.*

***Keywords: Financial Performance, Financial Statements, Financial Ratios.***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, Penilaian LKPD merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan. Hal ini berarti analisis rasio atas komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Atmojo, 2017)

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas. Draft SAP yang mengatur mengenai penggunaan basis akrual baru terbit pada tahun 2010. Hal ini menyebabkan penerapan SAP berbasis akrual baru dapat dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun setelah terbitnya peraturan tersebut yaitu pada tahun anggaran 2015. Hal ini menyebabkan penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2014 adalah penyusunan laporan keuangan paling akhir yang disusun dengan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) (Agus, 2015).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Laporan Keuangan tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ([ntt.bpk.go.id](http://ntt.bpk.go.id)). disisi lain mengenai struktur APBD pemerintah kabupaten Timor Tengah selatan 6 tahun terakhir periode

2015 – 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pemerintah pusat, kendati hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan tahun 2019 dan tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa walaupun tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi dan juga terjadi transisi atau pergeseran basis akuntansi pemerintah di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual tidak membuat pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menurunkan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan. Hal sebaliknya membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan yang dibuktikan dengan opini WTP atas laporannya. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Aktivitas.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kajian Teoritis**

#### **Grand Teori**

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. *Stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi Donaldson dan Davis, (1991) dalam (Anton, 2010).

#### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Mahmudi, (2015) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang

bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

### **Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan digunakan untuk menginformasikan kondisi usaha sebuah Perusahaan, untuk dapat mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan maka unsur-unsur dalam laporan keuangan perlu diperbandingkan satu dengan yang lain dengan menggunakan alat analisis yang tepat yakni rasio keuangan. Untuk dapat mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan lazimnya menggunakan rasio keuangan yaitu dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan. (Kerih, 2019).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Bisma (2016:18) menjelaskan analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Mahmudi, (2015) menjelaskan bahwa untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, maka sekurang-kurangnya rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja.

### **Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis sangat membutuhkan rasio keuangan untuk membantu menganalisis dan interpretasi laporan keuangan.

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menghitung laporan keuangan daerah, antara lain:

#### **Rasio Kemandirian Keuangan**

Rasio Kemandirian Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang telah diperlukan daerah (Mahsun, 2016:152). Secara matematis dapat di simpulkan dengan rumus:

**Tabel 1.** Rumus Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Penilaian Kemandirian Keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	Kurang dari 25%
Rendah	25% – 50%
Sedang	50% – 75%
Tinggi	75% - 100%
Sangat Tinggi	Diatas 100%

Sumber: Badan Litbang Depdagri.

### Rasio Efektifitas

Munawar (2016) menjelaskan bahwa analisis efektif pengelolaan anggaran adalah dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian anggaran.

Secara sistematis dapat di rumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3.** Rumus Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Maka untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 4.** Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%

Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Badan Litbang Depdagri

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik (Mahsun, 2016). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efektif. Oleh karena itu Secara sistematis dapat di rumuskan sebagai berikut:

**Tabel 5.** Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

**Tabel 6.** Penilaian Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	Diatas 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber :Badan Litbang Depdagri

### Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012).

**1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung**

Rasio Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) merupakan perbandingan antara total Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) dengan total Belanja Daerah. Rasio belanja rutin ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja rutin (belanja tidak langsung). Rumus yang di gunakan untuk menghitung rasio belanja rutin adalah :

**Tabel 7.** Rumus Rasio Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Rutin	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X100%
---------------------	--	-------

**2. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung**

Rasio belanja modal (belanja langsung) merupakan perbandingan antara total belanja modal (belanja langsung) dengan total Belanja Daerah. Rasio belanja modal ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal (belanja langsung) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus yang di gunakan untuk mengitung rasio belanja modal adalah :

**Tabel 8.** Rumus Rasio Belanja Modal/Belanja Langsung

Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X 100%
---------------------	--	--------

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012).

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan, menguraikan dan menjelaskan semua hasil perhitungan analisis rasio dari setiap rasio diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah,

rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio evelktifitas belanja daerah yang tentunya berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian menarik kesimpulan.

**Teknik Analisis Data.**

**1. Menghitung Menggunakan Rasio**

Analisis rasio menggunakan 4 rasio keuangan sektor publik mengacu pada buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik oleh Mahsun, (2016:152). Berikut rumus-rumus yang dipakai:

1) Rasio Kemandirian Keuangan

**Tabel 9.** Rumus Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah}}$	X 100%
-------------------	--	--------

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

2) Rasio Efektifitas

**Tabel 10.** Rumus Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$	X100%
-------------------	--	-------

Maka untuk menetapkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 11.** Penilaian Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Presentase Efektifitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Badan Litbang Depdagri

3) Rasio Efisiensi

**Tabel 12.** Rumus Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	$\frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$	X100%
-----------------	--	-------

Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:

**Tabel 13.** Penilaian Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak efisien	Diatas 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber :Badan Litbang Depdagri

4) Rasio Aktivitas

1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung

**Tabel 14.** Rumus Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Rutin	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
---------------------	---

- 2.
3. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung

**Tabel 15.** Rumus Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung

Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
---------------------	---

**2. Analisis Trend Metode Kuadrat Terkecil (least square method)**

Melakukan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil untuk melihat kecenderungan angka-angka rasio tertentu, sehingga diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik atau turun. Persamaan garis trend dirumuskan sebagai berikut (Hasan, 2016:201):

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

$$a = \frac{\sum Y}{n},$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

- $\hat{Y}$  = nilai *trend*
- $a$  = bilangan konstan
- $b$  = koefisien kecondrongan garis trend
- $n$  = periode waktu
- $X$  = waktu (bulan, kuartal, tahun)
- $Y$  = data berkala

Untuk menentukan garis trend, terlebih dahulu dicari nilai  $a$  dan  $b$  artinya jika nilai  $a$  dan  $b$  sudah diketahui maka garis trend dapat dibuat. (Hasan, 2016:201):

Dari hasil penghitungan, akan diketahui beberapa keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jika  $b$  bernilai positif, maka rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.
- Jika  $b$  bernilai negatif, maka rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio dilanjutkan dengan melakukan analisis trend kemudian membuat grafik berdasarkan angka-angka rasio dan nilai *trend* dan pada akhirnya membuat kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian.**

**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015-2020.**

**1. Rasio Kemandirian Keuangan.**

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 16 berikut:

**Tabel 16.** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	PAD (RP)	Dana Perse Perimbangan (%)	Kriteria
2015	76.086.	999.630. 7,61	Rendah Sekali
2016	71.848.	1.129.700 6,36	Rendah Sekali

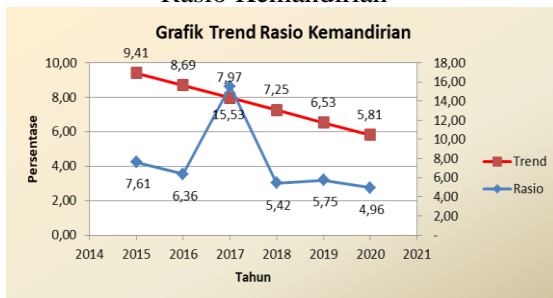
2017	189.534	1.220.081	15,53	Rendah sekali
2018	1.487.	1.318.011	5,42	Rendah sekali
2019	77.594.	1.349.485	5,75	Rendah sekali
2020	64.192	1.295.194	4,96	Rendah sekali
Rata-Rata			<b>7,53</b>	Sekali

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio kemandirian keuangan adalah:  
 $\hat{Y} = 7,61 - 0,36X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend maka grafik trend rasio keuangan dapat digambarkan seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Trend Rasio Kemandirian



Berdasarkan persamaan trend rasio kemandirian diperoleh nilai  $b = -0,36$  (b negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio kemandirian dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung menurun dari tahun ke tahun.

## 2. Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)

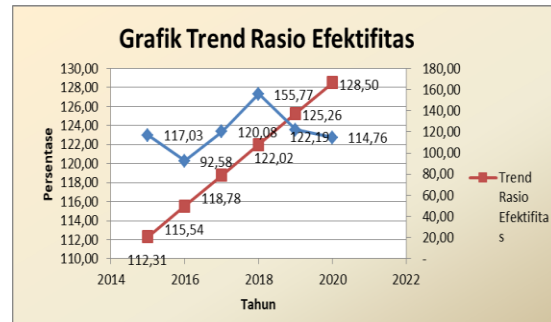
Tahun	Realisasi PAD (RP)	Target PAD (RP)	Persentase (%)	Kriteria
2015	76.086.	65.016.	117,03	Sangat Efektif
2016	71.848.	77.610.	92,58	Efektif
2017	189.534.	157.84.	120,08	Sangat Efektif
2018	111.360	71.487.	155,77	Sangat Efektif
2019	94.936.	77.694.	122,19	Sangat Efektif
2020	96.620.	84.192.	114,76	Sangat Efektif
Rata-Rata			<b>119,61</b>	Efektif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah:  
 $\hat{Y} = 7,61 + 1,62X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend rasio maka grafik trend rasio efektivitas dapat digambarkan seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Grafik Trend Rasio Efektivitas



Berdasarkan persamaan trend rasio efektivitas pendapatan asli daerah diperoleh nilai  $b = 1,62$  (b positif) aka dapat dilihat bahwa trend rasio efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai tahun

2020 cenderung meningkat dari tahu ke tahun.

### 3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 18 berikut:

**Tabel 18.** Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)

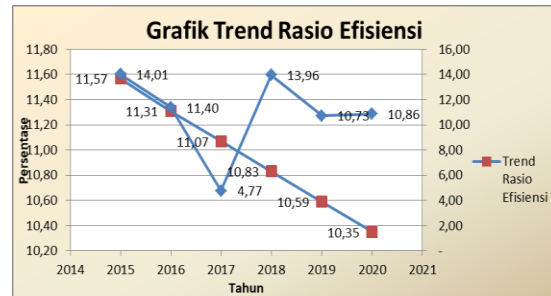
Tahun	Biaya Perolehan PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	Persentase (%)	Kriteria
2015	10.661	76.086.	14,01	Sangat Efisien
2016	8.187	71.848.	11,39	Sangat Efisien
2017	9.037	189.534	4,76	Sangat Efisien
2018	9.977	71.487.	13,96	Sangat Efisien
2019	8.325	77.594.	10,73	Sangat Efisien
2020	6.970.	64.192.	10,86	Sangat Efisien
	Rata-Rata		<b>9,65</b>	Sangat Efisien

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio efisiensi pendapatan asli daerah adalah:  $\hat{Y} = 10,95 - 0,12X$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai tren rasio efisiensi maka grafik trend rasio efisiensi dapat digambarkan seperti pada gambar 3.

**Gambar 3.** Grafik Trend Rasio Efisiensi



Berdasarkan persamaan trend rasio efisiensi pendapatan asli daerah diperoleh nilai  $b = -0,12$  ( $b$  negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio efisiensi pendapatan asli daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

### 4. Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 19 berikut:

**Tabel 19.** Rasio Belanja Rutin (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Rutin (RP)	Total Belanja Daerah (RP)	Persentase (%)
2015	758.775.	918.703.	82,59
2016	848.463	1.056.107.	80,33
2017	868.117	1.103.505	78,66
2018	906.909	1.189.388.	76,25
2019	882.029.	1.130.429.	78,03
2020	838.793	1.077.308.	77,86
	Rata-Rata		<b>78,81</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio belanja rutin adalah:

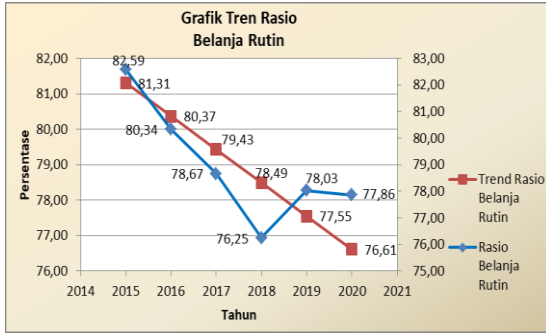
$$\hat{Y} = 78,96 - 0,47X$$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio belanja rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai



trend rasio maka grafik trend rasio belanja rutin dapat digambarkan seperti pada gambar 4.

**Gambar 4.** Grafik Trend Rasio Belanja Rutin



Berdasarkan persamaan trend rasio belanja rutin diperoleh nilai  $b = -0,47$  (b negatif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio belanja rutin dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 20 berikut:

**Tabel 20.** Rasio Belanja Modal (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Total Belanja Modal (RP)	Total Belanja Daerah (RP)	Persentase (%)
2015	159.844.	918.703.	17,39
2016	205.776	1.056.107	19,48
2017	235.387	1.103.505.	21,33
2018	282.478.	1.189.388	23,75
2019	248.312	1.130.429.	21,97
2020	218.800.	1.077.308.	20,31
Rata-Rata			<b>20,86</b>

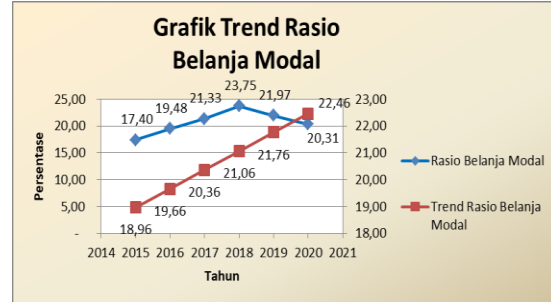
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan (Data Diolah, 2022)

Jadi persamaan trend untuk rasio belanja modal adalah:

$$\hat{Y} = 20,71 + 0,35X$$

Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan nilai trend rasio maka grafik trend rasio keuangan dapat digambarkan seperti pada gambar 5.

**Gambar 5.** Grafik Trend Rasio Belanja Modal



Berdasarkan persamaan trend rasio belanja modal diperoleh nilai  $b = 0,35$  (b positif) maka dapat dilihat bahwa trend rasio belanja modal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahu ke tahun.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 16 adalah sebesar 7,53% dengan klasifikasi kriteria rendah sekali karena masih berada pada skala interval kurang dari 25% ini menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama periode tersebut masih sangat rendah karena pendapatan transfer dari pemerintah Pusat dan Propinsi masih lebih mendominasi total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio kemandirian keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada

tabel 16 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio kemandirian seperti pada gambar 1 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai  $b$  negatif sebesar  $-0,36$  yang berarti bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dari aspek kemandirian semakin berkurang.

## 2. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio efektifitas yaitu, membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 17 adalah sebesar  $119,96\%$  dengan klasifikasi kriteria sangat efektif karena berada pada skala interval di atas  $100\%$ . ini menandakan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melampaui target Pendapatan Asli daerah yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efektifitas keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 17 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada gambar 2 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai  $b$  positif sebesar  $1,62$  yang berarti bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio efisiensi yaitu, membandingkan biaya pemerolehan PAD dibagi realisasi penerimaan PAD, menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 18 adalah sebesar  $9,65\%$  dengan klasifikasi kriteria sangat

efisien karena berada pada skala interval kurang dari  $60\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat efisien didalam menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu meminimalisir anggaran yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efisiensi keuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 18 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada gambar 4 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai  $b$  negatif sebesar  $-0,12$  yang berarti bahwa rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

## 4. Rasio Aktivitas Belanja

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis rasio belanja rutin, yaitu membandingkan total belanja rutin dibagi total belanja daerah menunjukkan bahwa, rata-rata Rasio Belanja Rutin periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 19 adalah sebesar  $78,81\%$  hal ini dapat diartikan bahwa dari total dana yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 sebagian besar dananya diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin seperti dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio belanja rutin Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 19, diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio belanja rutin seperti pada gambar 4 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai  $b$  negatif sebesar  $-0,47$  yang berarti bahwa rasio belanja rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa pemerintah

Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun ke tahun cenderung menurunkan atau mengurangi prioritas belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional dimana akan berbanding terbalik pada belanja modal.

Hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio belanja modal yaitu, membandingkan total belanja modal dibagi total belanja daerah menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Belanja Modal periode tahun 2015-2020 berdasarkan tabel 20 adalah sebesar 20,86% hal ini dapat diartikan bahwa, dari total dana yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 sebesar 20,86% diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal pembangunan daerah atau menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio belanja modal Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tabel 20 diperoleh persamaan trend rasio dan juga grafik trend rasio belanja modal seperti pada gambar 5 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar 0,35 yang berarti bahwa rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun ke tahun cenderung meningkatkan prioritas belanjanya pada belanja modal guna menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain aktivitas belanja pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan analisis trend cenderung mengalami peningkatan pada belanja modal dari tahun ke tahun atau kinerja aktivitas belanjanya semakin baik.

## **KESIMPULAN**

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari kemandirian keuangan daerah memperoleh klasifikasi Kriteria rendah sekali karena berada pada interfal di bawah 25%, sedangkan melalui analisis *trend* menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami penurunan kemandirian dari tahun ke tahun.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari efektifitas pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria sangat efektif karna berada pada interfal di atas 100%, sedangkan melalui analisis trend menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami peningkatan efektifitas dari tahun ke tahun.
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 ditinjau dari efisiensi pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria sangat efisien karna berada pada interfal di bawah 60%, sedangkan melalui analisis trend menunjukkan bahwa rasio ini cenderung selalu mengalami peningkatan efisien dari tahun ke tahun.
4. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan aktivitas belanja daerah melalui belanja rutin dan belanja modal menunjukkan bahwa aktivitas belanja pemerintah daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja operasional dari pada belanja modal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, S. (2015) *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*. 4th edn. Yogyakarta: BPFE.
- Anton, A. (2010) *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmojo, D. T. (2017) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag ( Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 )', *Diponegoro Jurnal Of Accaunnting*, 6,

- pp. 1–15.
- Bisma, I. D. G. and Susanto, H. (2016) 'Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007', *Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram*, 04(03), pp. 75–86.
- Fahmi, I. (2012) *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, I. (2016) *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kerih, A. S. Y. (2019) 'Analisis Kinerja Keuangan Pada Swalayan Sumber Makmur Kota Kupang', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana*, 7(1), pp. 75–89.
- Mahmudi (2015) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 3rd edn. Yogyakarta: cv. Andi.
- Mahsun, M. (2016) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Pert. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawar, U. M. (2016) 'Model Akuntansi Berbasis Akrua Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang', *Jurnal Akuntansi*, 3(2), pp. 18–34.